



Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja Melalui Program UCOK (*Universal Coverage Ketenagakerjaan*) Di Kabupaten Badung

Indira Pasha Kumara Dewi^{*a}, Ni Putu Anik Prabawati^a, I Dewa Ayu Putri Wirantari^a

^a Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

* Correspondence: indirapashakumaradewi@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam upaya Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja melalui Program UCOK (*Universal Coverage Ketenagakerjaan*) di Kabupaten Badung. Teori yang digunakan yakni Teori Kinerja dari Mahsun yang mencakup Masukan (*input*), Proses (*process*), Keluaran (*output*), Hasil (*outcome*), Manfaat (*benefit*), dan Dampak (*impact*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam Kerja dalam upaya Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja melalui Program UCOK (*Universal Coverage Ketenagakerjaan*) di Kabupaten Badung sudah berjalan dengan baik namun belum optimal dikarenakan, komponen yang mendukung keberhasilan program belum berjalan dengan baik. Seperti, keterbatasan SDM (sumber daya manusia), belum ada SOP yang pasti untuk program sehingga program berjalan kurang efektif, *output* dari program belum pasti, serta belum ada tim pengawas pasti yang melakukan pengawasan terhadap kinerja dari dinas.

Kata Kunci: Kinerja, Kesejahteraan Tenaga Kerja, Program UCOK (*Universal Coverage Ketenagakerjaan*), Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung

Abstract

The purpose of this study was to determine the Performance of the Industry and Manpower Office in an effort to Improve Workers' Welfare through the UCOK (Universal Coverage Employment) Program in Badung Regency. The theory used is Mahsun's Performance Theory which includes inputs, processes, outputs, outcomes, benefits, and impacts. This research uses descriptive qualitative methods with data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation studies. The results showed that the performance of the Department of Industry and Manpower in an effort to improve the welfare of workers through the UCOK Program (Universal Coverage of Employment) in Badung Regency has been running well but not optimal because the components that support the success of the program have not run well. Such as, limited human resources (human resources), there is no definite SOP for the program so that the program runs less effectively, the output of the program is uncertain, and there is no definite supervisory team that supervises the performance of the agency.

Key Words: Performance, Worker Welfare, UCOK (Universal Coverage of Employment) Program, Badung Regency Industry and Manpower Office

1. Pendahuluan

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan berupa sosial ekonomi kepada masyarakat yang sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara, hal ini dikarenakan sumber daya manusia di Indonesia masih tergolong cukup rendah. Data BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan bahwa tenaga kerja di Indonesia lebih dominan untuk pendidikan akhir SD kebawah dibandingkan pendidikan akhir diploma dan universitas. Jika dilihat dari faktor pendukung kualitas sumber daya manusia saat ini, faktor pendidikan akhir sangat penting dalam

meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia yang mampu beradaptasi dengan perubahan sosial masyarakat. Pemerintah Indonesia sedang gencar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia saat ini dalam mencetak kualitas yang unggul sebagai modal utama supaya dapat bersaing di ranah global. Selain itu, dengan kualitas sumber daya manusia yang unggul juga mampu menaikkan taraf hidup masyarakat dan roda perekonomian juga akan meningkat.

Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) merupakan upaya pemerintah untuk menjamin bagaimana kesejahteraan masyarakat bisa terjamin di semua bidang pekerjaan. Jamsostek sendiri mengalami perjalanan yang cukup panjang di Indonesia dimulai dari tahun 1947 sampai 2004. Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan yang cukup baik, perlindungan hukum pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Kemudian pada tahun 1992 lahir UU No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dan melalui PP No.36 Tahun 1995 ditetapkannya PT. JAMSOSTEK sebagai badan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan berupa perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarga mereka dengan memberikan keberlangsungan arus penerimaan penghasilan keluarga yang pasti sebagai bentuk pengganti sebagian atau keseluruhan penghasilan yang hilang yang diakibatkan risiko sosial.

Kemudian di akhir tahun 2004, Pemerintah menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang berkaitan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2. Pasal tersebut kini berbunyi “Negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah, dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Perlindungan ini bermanfaat untuk memberikan rasa aman kepada para tenaga kerja sehingga dapat berkonsentrasi lebih dalam untuk meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

Kabupaten Badung memiliki beberapa dinas yang berfungsi membantu jalannya pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Salah satunya yaitu Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang menaungi bidang industri dan juga tenaga kerja di Kabupaten Badung. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung, yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perindustrian dan tenaga kerja.

Kabupaten Badung menjalankan komitmen untuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui sebuah inovasi bernama *Universal Coverage* Ketenagakerjaan (UCOK). Program ini bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat melalui tenaga kerja dimana tenaga kerja sendiri memiliki peran yang strategis dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi. Sejak pandemi covid-19 di Indonesia, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Badung mengalami penurunan drastis mencapai -16,55% dari sebelumnya. Namun sejak BPJS Ketenagakerjaan mulai diperhatikan kembali untuk tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Badung dapat meningkat. Adapun data Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Badung sebagai berikut:

Gambar 1. Data Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung



Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung

Dari data diatas, Kabupaten Badung mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sejak terjadinya pandemi covid-19 di seluruh dunia. Halini menyebabkan banyak kasus phk untuk tenaga kerja dikarenakan kebijakan untuk membatasi pertemuan tatap muka dijalankan oleh pemerintah. Sehingga tidak sedikit tenaga kerja di Indonesia diharuskan untuk bekerja dari rumah (*workfrom home*). Tidak sedikit pula tenaga kerja yang tidak bisa melanjutkan pekerjaanmereka atau biasa kita sebut di phk karena beberapa perusahaan tidak bisa memberikan upah sehingga ekonomi masyarakat menurun. Menurunnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi menyebabkan munculnya kemiskinan dimasyarakat. Menurut Kotze (dalam Hikmat, 2004:6) menyatakan bahwa masyarakat miskin memiliki kemampuan yang relatif baik untuk memperoleh sumber melalui kesempatan yang ada.

Kendatipun bantuan luar kadang-kadang digunakan, tetapi tidak begitu saja dapat dipastikan sehingga masyarakat bergantung pada dukungan dari luar. Dukungan dari luar yang bisa kita peroleh seperti dilaksanakannya program pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada. Baik dari segi ekonomi maupun berupa jaminan yang berguna dikemudian hari. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa dampak dari covid-19 ini jelas terlihat bagi rodaperekonomian masyarakat Indonesia sampai ke beberapa provinsi hingga kabupaten/kota.

Pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran memiliki hubungan yang erat karena penduduk yang bekerja berkontribusi dalam menghasilkan barang dan jasa, sedangkan pengangguran tidak memberikan kontribusi. Tingginya angka pengangguran salah satunya disebabkan banyaknya permintaan perusahaan ataulapangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan mereka para pencari kerja, banyaknya perusahaan yang mencari lulusan diploma ataupun sarjana. Karenanya pengangguran merupakan pertanggung jawaban kolektif, terlebih lagi pemerintah untuk bisa mencari solusi supaya menekan angka pengangguran yang terdapat di Indonesia (Rizki Ardian, 2022). Adapun data tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Badung sebagai berikut:

Gambar 2. Data Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Badung



Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung Dalam data tersebut, dapat dilihat bahwa angka pengangguran meningkat baik

secara nasional hingga ke provinsi kemudian ke kabupateb/kota. Kabupaten Badung nengalami kenaikan angkat pengangguran pada tahun 2020 sejak terjadinya pandemi covid-19. Kemudian mengalami penurunan ditahun berikutnya namun masih dikategorikan tinggi. Ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan terjadi. Di Kabupaten Badung sendiri angka pengangguran terbilang cukup tinggi saat pandemi covid-19 meningkat sebesar 6,92% menurut data yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Meningkatnya angka pengangguran dapat disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja yang meningkat setiap tahunnya. Saat pandemi covid-19 terjadi, angka pengangguran juga meningkat mengingat adanya kebijakan dari pemerintah untuk mengurangi kegiatan tatap muka. Pemerintah menghimbau untuk beraktivitas dari rumah, salah satunya bekerja dari rumah (*work from home*). Namun, tidak sedikit juga masyarakat yang terkena phk akibat adanya pandemi covid-19 sehingga

membuat tenaga kerja di Indonesia menurun kualitasnya dan angka pengangguran kian meningkat.

Akibat adanya kasus saat pandemi covid-19 yang menyasar tenaga kerja, perlu ditingkatkan bagaimana upaya pemerintah dalam kembali menyejahterakan tenaga kerja dengan berakhirnya masa pandemic covid-19. Kesejahteraan masyarakat pekerja termasuk strategi yang mampu meningkatkan partisipasi para pekerja dalam usaha seorang dalam upaya meningkatkan jaminan kepada para tenaga kerja. Selain untuk mempertahankan karyawan agar tidak pindah ke perusahaan lain, dan untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja karyawan.

Kesejahteraan sangat bermanfaat bagi para pekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga mereka. Ada banyak program kesejahteraan untuk para pekerja seperti tunjangan, beban kerja dan kompensasi yang jelas, asuransi kesehatan, perencanaan karier, pemberian kredit, kenyamanan dan keselamatan kerja, perencanaan pensiun. Kesejahteraan merujuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia dalam keadaan makmur, keadaan sehat dan damai, tetapi dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial mengacu pada berbagai pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kesejahteraan tenaga kerja dapat diukur melalui bagaimana kinerja berlangsung. Kinerja merupakan hasil kerja baik dari segi kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan. Namun hasil kerja yang baik yang ingin dicapai sesekali mengalami kendala. Kendala ini bisa berupa ketersediaan SDM (sumber daya manusia) yang ada masih kurang atau capaian kinerja yang belum maksimal. Ketersediaan SDM (sumber daya manusia) yang masih kurang biasanya disebabkan oleh ketimpangan tugas dari pegawai dengan program kerjanya ada. Sehingga beban kerja yang didapat lebih padat dan ini juga berkaitan dengan capaian kinerja suatu organisasi. Dengan kurangnya ketersediaan SDM (sumber daya manusia) yang ada akan mempengaruhi capaian kinerja organisasi tersebut sehingga tidak sesuai dengan target yang ditentukan di awal.

Kesejahteraan tenaga kerja perlu terus diperhatikan demi meningkatkan motivasi kerja para tenaga kerja. Di Kabupaten Badung sendiri, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sudah melakukan inovasi sebuah program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan sasaran semua pegawai yang ada. Kabupaten Badung sendiri memiliki keistimewaan dalam peluncuran program ini dikarenakan mengelompokkan seluruh pegawai di kalangan tenaga kerja sektor formal dan tenaga kerja sektor informal.

Inovasi program UCOK (Universal Coverage Ketenagakerjaan) merupakan program jaminan sosial tenaga kerja yang menyasar tenaga kerja formal dan informal di Kabupaten Badung sebanyak 150.000 tenaga kerja yang setiap tahunnya akan menyasar kurang lebih 35.000 tenaga kerja. Penyelenggaraan program ini disusun bersama tim pelaksana yang melibatkan 18 OPD dan BPJS Ketenagakerjaan. 18 OPD yang dimaksud meliputi Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, kepala Dinas Kebudayaan, Kepala Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Dinas Kesehatan, Camat Mengwi, Camat Abiansemal, Camat Petang, Camat Kuta Utara, Camat Kuta, Camat Kuta Selatan.

Pemerintah Kabupaten Badung akan memberikan Rp. 16.800 per bulan melalui program ini selama tenaga kerja tersebut aktif dan umur maksimal pekerja ber-KTP Badung 65 tahun. Pelaksanaan program UCOK (*Universal Coverage* Ketenagakerjaan) per bulan maret 2023 telah mengcover sebanyak 62% dari tenaga kerja formal dan sebanyak 25,508,17% untuk tenaga kerja informal. Sehingga yang sudah menerima coverage jaminan sosial ketenagakerjaan sebesar 44,78% per maret 2023. Untuk tahun 2023 sendiri jumlah tenaga kerja yang sudah tercover sebanyak 10.828 pekerja (Non ASN dan Sektor Adat). Pemerintah Kabupaten Badung khususnya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten masih mengusahakan untuk mengcover sisanya namun terdapat beberapa kendala seperti pengumpulan serta verifikasi data yang tentunya memerlukan waktu.

Program Universal Coverage Ketenagakerjaan ini diluncurkan dengan pertimbangan beberapa aspek permasalahan seperti Penurunan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Badung, kemudian Peningkatan Angka Pengangguran terbuka di Kabupaten Badung, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang belum merata untuk kalangan formal dan informal di Kabupaten Badung serta kinerja dari Dinas yang menaungi program ini

seperti capaian kinerja yang belum optimal dan SDM yang kurang untuk keberlangsungan program.

Dengan adanya program UCOK (*Universal Coverage Ketenagakerjaan*) ini diharapkan seluruh kalangan tenaga kerja yang ada di Kabupaten Badung dapat tercover untuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mereka dan upaya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja melalui program ini dikatakan berhasil. Berdasarkan pada penjelasan diatas, adapun tujuan dari penelitian ini ialah guna mengetahui bagaimana kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melalui program *Universal Coverage Ketenagakerjaan* dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di Kabupaten Badung.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Pada penelitian ini, penulis berusaha dalam menggambarkan sebuah fenomena sosial. Penelitian kualitatif deskriptif menafsirkan perihal suatu kondisi yang berlangsung, perbedaan fakta-fakta, serta relasi dan pengaruh terhadap sebuah situasi. Penulisan menarik permasalahan perihal Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja melalui program UCOK (*Universal Coverage Ketenagakerjaan*) di Kabupaten Badung. Dalam sudut pandang penelitian kualitatif, fenomena ini bersifat holistik yang memiliki arti tak dapat dipisahkan, alhasil penulis kualitatif harus meninjau dalam kondisi sosial dengan cara keseluruhan. (Moleong, 2014:6). Pada metode kualitatif ini memberikan data-data yang bersifat lengkap dengan adanya perkembangan masalah dalam situasi sosial. Metode penelitian deskriptif tertuju dalam penyelesaian permasalahan yang berlangsung di masa kini sebagai kunci pada apa yang telah diriset (Moleong, 2014:11).

Metode riset kualitatif deskriptif semacam pengumpulan data, menganalisa data, menginterpretasikan data, serta diakhiri dengan suatu kesimpulan yang mengacu dalam penganalisaan data. Penelitian ini dilakukan tidak semata-mata hanya memberikan penjelasan dengan cara menyeluruh terkait permasalahan yang hendak diteliti serta diamati, namun dapat menjawab permasalahan dan mengolah hasil penelitian dengan melakukan analisa.

Penelitian ini yang dijadikan unit penelitian adalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung. Unit analisis yang digunakan ialah untuk mengetahui Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung.

Pada penelitian kualitatif penentuan informan menggunakan dua metode yaitu *probability* dan *non-probability*. Teknik yang dipakai pada penelitian ini yaitu *non-probability* yaitu dengan Teknik *purposive* dan *snowball*. *Purposive* menurut Martono (2010) ialah metode penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kita memilih seseorang selaku sampel dengan memilih seseorang yang betul-betul memahami ataupun mempunyai kompetensi dengan topik riset sehingga hendak menghasilkan data yang valid. *Snowball* sendiri merupakan metode penentuan sampel yang pada awalnya memiliki jumlah yang kecil, kemudian menjadi besar. Penulis memilih beberapa informan yang dianggap benar-benar mampu memberikan informasi dan juga pemaparan terkait kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja melalui program UCOK (*Universal Coverage Ketenagakerjaan*) di Kabupaten Badung. Dan informan yang dipilih merupakan informan yang memang menaungi atas pelaksanaan program UCOK (*Universal Coverage Ketenagakerjaan*) sehingga informan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah yang benar – benar paham terkait penyelenggaraan program UCOK (*Universal Coverage Ketenagakerjaan*) di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*". Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Selanjutnya disarankan dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat menggunakan berupa grafik, matrik, jenjang kerja, dan chart.

3. Hasil dan Pembahasan

Tabel 1. Rangkuman Hasil Temuan di Lapangan

No.	Indikator	Hasil Temuan
1.	Masukan (<i>input</i>)	Dari indikator ini, hasil kinerja dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung dinilai yaitu: - Program UCOK (<i>Universal Coverage</i> Ketenagakerjaan) mendapatkan dana langsung dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk mendukung jalannya program. Dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebesar 7 milyar setiap tahunnya sehingga program ini dapat berjalan efektif. - SDM yang ada pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di Kabupaten Badung masih kurang untuk memenuhi target dari program-program yang sedang berjalan. Sehingga, program UCOK (<i>Universal Coverage</i> Ketenagakerjaan) melakukan kerjasama dengan 18 OPD di Kabupaten Badung yaitu, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepala Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Dinas Kesehatan, Camat Mengwi, Camat Abiansemai, Camat Petang, Camat Kuta Utara, Camat Kuta, Camat Kuta Selatan. - Pelaksanaan program ini hanya menggunakan sarana dan prasarana seperti komputer/laptop kantor untuk proses pelaksanaan program, dan juga kamera yang sudah memadai untuk dokumentasi saat kegiatan evaluasi program atau saat kunjungan yang berkaitan dengan program.
2.	Proses (<i>process</i>)	Dari indikator ini, hasil kinerja dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung dinilai yaitu: - Ketepatan dan kecepatan program ini terbilang belum optimal. Mengingat program ini baru diluncurkan dan target yang ditentukan untuk program ini ada pada tahun 2026 membuat pergerakan awal dari pelaksanaan program ini masih perlu untuk di evaluasi dan diperbaiki dipelaksanaan berikutnya. - Sebelum adanya program UCOK (<i>Universal Coverage</i> Ketenagakerjaan), Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung belum mengalami peningkatan kinerja yang baik untuk kesejahteraan tenaga kerja yang ada. Namun saat program UCOK (<i>Universal Coverage</i> Ketenagakerjaan) ini diluncurkan, selama satu tahun percobaan mengalami peningkatan yang jauh lebih pesat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Proses yang dialami dari tahun ketahun menentukan bagaimana program ini berperan penting dalam keberhasilan kinerja. - Persentase pekerja penerima Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari tahun 2019 yakni: 1. 2019 : 34,24% 2. 2020 : 35,58% 3. 2021 : 30,05% 4. 2022 : 42,73% 5. 2023 : 44,78%

3.	Keluaran (<i>output</i>)	Dari indikator ini, hasil kinerja dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung dinilai melalui keluaran yang dihasilkan dari indikator proses bahwa pelaksanaan program ini memiliki <i>output</i> yang akan berbeda di setiap tahunnya. Adapun pelaksanaan program tetap sama, namun kondisi lapangan dengan kerjasama 18 OPD terkait memberi dampak dalam hasil keluaran program. Pada tahun 2022 total santunan yang diberikan sebesar 386,114,209 juta sedangkan di tahun 2023 total santunan yang diberikan sebesar 489,021,573 juta rupiah.
4.	Hasil (<i>outcomes</i>)	Dari indikator ini, hasil kinerja dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung yaitu: - Dengan meluncurkan program UCOK (Universal Coverage Ketenagakerjaan) ini, dapat menekan angka pengangguran terbuka di tahun 2023 dan diharapkan dapat konsisten di tahun berikutnya. Berikut angka pengangguran Kabupaten Badung dari tahun 2018 yakni: 1. 2018 : 1.590 2. 2019 : 1.438 3. 2020 : 27.324 4. 2021 : 28.027 5. 2022 : 28.650 6. 2023 : 9.080 - Hasil dari program ini belum dirasakan oleh semua kalangan masyarakat serta belum dirasakan oleh semua pekerja sektor informal. Sektor informal hanya baru menyasar sulinggih dan beberapa pemangku di beberapa daerah. Jadi program ini belum bisa dikatakan maksimal untuk hasil yang ingin dirasakan oleh masyarakat
5.	Manfaat (<i>benefit</i>)	Dari indikator ini, hasil kinerja dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung yaitu: - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung meluncurkan sebuah program UCOK (Universal Coverage Ketenagakerjaan) dimana ada 2 program didalamnya yang memberikan 7 manfaat untuk para tenaga kerja, yaitu : 1. Manfaat berdasarkan Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2019 Penggantian Biaya Transport (maksimum) 2. Santunan sementara tidak mampu bekerja (pengganti upah saat belum mampu bekerja) 3. Biaya pengobatan dan perawatan (sesuai indikasi medisi) 4. Biaya lain seperti biaya alat bantu dengan, kacamata, dan home care. 5. Santunan cacat 6. Meninggal dunia akibat kecelakaan kerja 7. Santunan kematian di luar hubungan kerja - Dengan hanya membayar iuran sebesar 16.800 perbulan, manfaat ini dapat dirasakan oleh seluruh tenaga kerja yang sudah dinyatakan tergabung dalam sasaran program ini.

6.	Dampak (<i>impact</i>)	Dari indikator ini, hasil kinerja dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung yaitu: - Dampak dari program ini berkaitan dengan tujuan dari dilaksanakannya program UCOK (<i>Universal Coverage Ketenagakerjaan</i>), yaitu ingin meningkatkan kesejahteraan dari tenaga kerja dengan keselamatan kerja yang terjamin. Untuk menjamin itu, program ini bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan supaya tidak ada satupun tenaga kerja yang tertinggal untuk mendapatkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. - dampak yang diberikan dari keberlangsungan program UCOK (<i>Universal Coverage Ketenagakerjaan</i>) ini menyasar masyarakat tenaga kerja dan pemerintah sendiri. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung yang menanggung langsung dan bertanggung jawab penuh atas program ini. Dampak yang dirasakan memang belum terlihat dengan jelas, namun dari hasil yang sudah ada sejauh ini, belum ada kendala yang berarti yang menyebabkan program ini memberikan dampak yang buruk baik bagi masyarakat tenaga kerja maupun bagi pemerintah. Dampak dari adanya program ini juga akan terus ditinjau kedepannya untuk hasil yang lebih baik
----	--------------------------	---

sumber: diolah sendiri

Pembahasan

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, adapun hasil analisis Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja melalui Program UCOK (*Universal Coverage Ketenagakerjaan*) di Kabupaten Badung mengacu pada teori Mahsun dengan enam (6) indikator yang berpengaruh pada keberhasilan dan kegagalan suatu kinerja organisasi. Adapun indikator kinerja oleh Mahsun yakni Masukan (*input*), Proses (*process*), Keluaran (*output*), Hasil (*outcomes*), Manfaat (*benefit*), dan Dampak (*impact*).

Masukan (*Input*)

Indikator masukan (*input*) menggambarkan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan maksimal, dimana indikator masukan dalam penelitian ini menyajikan sumber dana dan sarana prasarana yang digunakan dalam upaya untuk mensejahterakan tenaga kerja melalui program UCOK (*Universal Coverage Ketenagakerjaan*) oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di Kabupaten Badung.

Sumber dana untuk menunjang kegiatan program UCOK (*Universal Coverage Ketenagakerjaan*) ini berasal dari APBD Kabupaten Badung sebesar 7 milyar rupiah setiap tahunnya. Program UCOK (*Universal Coverage Ketenagakerjaan*) mendapatkan dana langsung dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk mendukung jalannya program. Dari dana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, alokasi dana untuk mendukung program ini berjalan secara efektif karena mampu menghemat anggaran sebesar 2 milyar rupiah. Hal ini tentu menjadi awal yang baik dari pelaksanaan program karena dukungan penuh dari Pemerintah Daerah untuk mendanai program ini. Dari sumber dana ini bisa menjadi peluang dalam mengukur kualitas kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung, mengingat sumber dana menjadi salah satu pondasi kuat keberhasilan program. Kinerja baru akan mencapai hasil yang maksimal jika ada dana yang memadai dan fasilitas yang baik.

Selain sumber dana untuk menunjang keberlangsungan program, sumber daya manusia (SDM) juga penting untuk berjalannya suatu program. Dalam program UCOK (*Universal Coverage Ketenagakerjaan*) sumber daya manusia berperan penting untuk kesuksesan program ini. Ketersediaan SDM untuk keberlangsungan program perlu diperhatikan agar mencapai hasil yang efektif. SDM yang ada pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di Kabupaten Badung masih kurang untuk memenuhi target dari program-program yang sedang berjalan. Maka dari itu, beberapa program yang berjalan salah satunya program UCOK (*Universal Coverage Ketenagakerjaan*) melakukan kerjasama dengan pihak luar demi lancarnya keberlangsungan program kerja dan tercapainya target yang sudah ditentukan. Peran dari adanya kerjasama dengan OPD di Kabupaten

Badung memberi bantuan yang berarti untuk memudahkan tercapainya keberhasilan program UCOK (*Universal Coverage* Ketenagakerjaan).

Dengan bekerjasama melalui 18 OPD di Kabupaten Badung yakni Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, kepala Dinas Kebudayaan, Kepala Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Dinas Kesehatan, Camat Mengwi, Camat Abiansemal, Camat Petang, Camat Kuta Utara, Camat Kuta, Camat Kuta Selatan, selain menjalin hubungan saling membantu satu dengan yang lainnya, kinerja dinas menjadi lebih terstruktur. Namun disisi lain, dengan banyaknya kerjasama yang dilakukan akan semakin menyulitkan kinerja dinas karena mempengaruhi ketepatan target yang sudah direncanakan.

Pelaksanaan program ini tidak menggunakan banyak sarana dan prasarana, hanya menggunakan sarana dan prasarana seperti komputer/laptop kantor untuk proses pelaksanaan program, dan juga kamera yang sudah memadai untuk dokumentasi saat kegiatan evaluasi program atau saat kunjungan yang berkaitan dengan program. Program ini lebih menjalin kerjasama dengan instansi di Kabupaten Badung dan juga bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagai penentu efisiensi program.

Berdasarkan Teori Kinerja Mahsun pada indikator masukan (input) dalam penelitian ini dapat disimpulkan belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan komponen yang mendukung untuk keberhasilan program terdapat kendala. Kendala yang dimaksud adalah masih kurangnya sumber daya manusia untuk mencapai keberhasilan program, sehingga harus melibatkan instansi lain untuk

mendorong keberlangsungan program. Bekerjasama dengan instansi lain akan memberikan dampak yang kurang baik terhadap kinerja dinas itu sendiri. Salah satu contohnya seperti keterlambatan informasi yang masuk untuk mengcover Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sehingga akan mempengaruhi ketepatan capaian program.

Proses (*Process*)

Indikator proses (*process*) adalah segala besaran yang menunjukkan upaya atau aktivitas yang dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran. Indikator proses dalam penelitian ini menyajikan proses *coverage* Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk para tenaga kerja yang sudah lolos tahap verifikasi data yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung.

Ketepatan dan kecepatan program UCOK (*Universal Coverage* Ketenagakerjaan) ini terbilang belum optimal. Mengingat program ini baru diluncurkan dan target yang ditentukan untuk program ini ada pada tahun 2026 membuat pergerakan awal dari pelaksanaan program ini masih perlu untuk di evaluasi dan diperbaiki dipelaksanaan berikutnya. Dengan adanya proses pelaksanaan program UCOK (*Universal Coverage* Ketenagakerjaan), Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung belum mengalami peningkatan kinerja yang baik untuk mensejahterakan tenaga kerja yang ada. Namun saat program UCOK (*Universal Coverage* Ketenagakerjaan) ini diluncurkan, selama satu tahun percobaan dan mengalami peningkatan yang jauh lebih pesat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Proses yang dialami dari tahun ketahun menentukan bagaimana program ini berperan penting dalam keberhasilan kinerja.

Mengingat program ini baru diluncurkan dan saat ini masih banyak yang harus disempurnakan guna mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tidak hanya bisa mengandalkan jadwal pelaksanaan program saja. Karena bekerjasama dengan banyak pihak akan menimbulkan kesulitan dalam proses *coverage* program ini. Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tidak hanya diukur dari bagaimana proses keberlangsungan program ini saja, tapi juga bagaimana proses menjalin kerjasama dengan 18 OPD terkait agar capaian program ini sesuai dengan diawal saat perencanaan program ini.

Berdasarkan Teori Kinerja Mahsun pada indikator proses (*process*) dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program UCOK (*Universal Coverage* Ketenagakerjaan) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di Kabupaten Badung belum optimal. Karena, masih belum ada SOP yang pasti untuk keberlangsungan program ini. Selain itu, jadwal yang sudah

ditetapkan pun masih belum efektif mengingat banyak keterlambatan yang terjadi dalam meng-cover Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk para pekerja yang sudah lolos verifikasi. Hal ini dikarenakan proses pelaksanaan yang belum pasti kapan waktu yang tepat untuk memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Selain itu, alur pelaksanaan pun masih rancu dan belum dibuatkan mekanisme yang jelas dan yang pasti agar memudahkan pelaksanaan program.

Keluaran (Output)

Indikator keluaran menunjukkan hasil kerja berupa barang atau jasa yang sudah dicapai melalui langkah proses. Keluaran yang dihasilkan dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung berupa jasa dalam memberikan wadah untuk para tenaga kerja mendapatkan pelayanan. Pelayanan yang dimaksud adalah jaminan selama mereka menjadi tenaga kerja yang akan ditanggung oleh pemerintah.

Pelaksanaan program ini memiliki *output* yang akan berbeda disetiap tahunnya. Adapun pelaksanaan program tetap sama, namun kondisi dilapangan dengan kerjasama 18 OPD terkait memberi dampak dalam hasil keluaran program. Menurut data dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung, pada tahun 2022 total santunan yang diberikan sebesar 386,114,209 juta sedangkan ditahun 2023 total santunan yang diberikan sebesar 489,021,573 juta rupiah dalam pelaksanaan program UCOK (*Universal Coverage Ketenagakerjaan*).

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan program UCOK (*Universal Coverage Ketenagakerjaan*) masih hanya sebatas laporan biasa saat kegiatan evaluasi berlangsung. Belum ada bentuk keluaran berupa laporan resmi untuk saat ini, mengingat program ini baru berjalan 2 tahun dan masih banyak yg harus diperbaiki dan disempurnakan dari sistem pelaksanaannya hingga keluaran yang dihasilkan dari jalannya program ini.

Berdasarkan Teori Kinerja Mahsun pada indikator keluaran dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keluaran dari program UCOK (*Universal Coverage Ketenagakerjaan*) belum memiliki bentuk yang pasti. Saat ini hanya dalam bentuk laporan yang dipresentasikan saat kegiatan evaluasi berlangsung. Keluaran yang diharapkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran program tidak berjalan beriringan. Dimana tujuan dan sasaran program ini sudah jelas namun keluaran yang dihasilkan belum memiliki kejelasan sampai ditahun 2023.

Hasil (Outcomes)

Indikator hasil (*outcomes*) dalam suatu kinerja organisasi adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah (efek langsung), hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan. Hasil dari penelitian ini diukur dari seberapa efektif program ini dalam memecahkan permasalahan yang membuat program ini diluncurkan. Hasil yang diberikan dengan dilaksanakannya program ini yaitu permasalahan angka pengangguran terbuka yang melesat tingga akibat pandemi covid-19 sudah sangat baik. Mengingat sebelum program ini dilaksanakan, angka pengangguran terbuka di Kabupaten Badung mencapai angka 27.324.00 pada tahun 2020 dan terus naik hingga mencapai angka

28.650.00 pada tahun 2022. Program ini dibuat dan mulai beroperasi pada tahun 2021 dan angka pengangguran terbuka masih terus meningkat hingga tahun berikutnya. Namun pada akhirnya dapat mengalami penurunan drastis pada tahun 2023 diangka 9.080.00 dimana hal ini terjadi akibat hasil yang diberikan oleh program UCOK (*Universal Coverage Ketenagakerjaan*).

Namun dilain hal, hasil dari program ini belum dirasakan oleh semua kalangan masyarakat serta belum dirasakan oleh semua pekerja sektor informal. Sektor informal hanya baru menyasar sulinggih dan beberapa pemangku di beberapa daerah. Jadi program ini belum bisa dikatakan maksimal untuk hasil yang ingin dirasakan oleh masyarakat khususnya tenaga kerja sektor informal. Belum meratanya *coverage* yang dilakukan disebabkan oleh salah satu faktor yakni *deadline* untuk hasil program UCOK (*Universal Coverage Ketenagakerjaan*) perlulebih diperhatikan. Sehingga nantinya hasil dari pelaksanaan program juga dapat dilihat secara transparan dari segi waktu, ketepatan, dan kesesuaian capaian program.

Berdasarkan Teori Kinerja Mahsun pada indikator hasil dalam penelitian ini dapat disimpulkan belum optimal. Mengingat permasalahan diawal belum meratanya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja formal dan informal, hasil yang diberikan selama 2 tahun program ini berjalan tidak tercapai. Hasil yang baru

dicapai pun belum menginjak 50% dari target tenaga kerja yang menjadi sasaran program.

Manfaat (*Benefit*)

Indikator manfaat (*benefit*) adalah segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan, menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil, menunjukkan hal-hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi dan waktu).

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung meluncurkan sebuah program UCOK (Universal Coverage Ketenagakerjaan) dimana ada 2 program didalamnya (Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian) yang memberikan 7 manfaat untuk para tenaga kerja, yaitu :

1. Manfaat berdasarkan Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2019 Penggantian Biaya Transport (maksimum)
2. Santunan sementara tidak mampu bekerja (pengganti upah saat belum mampu bekerja)
3. Biaya pengobatan dan perawatan (sesuai indikasi medisi)
4. Biaya lain seperti biaya alat bantu dengan, kacamata, dan home care.
5. Santunan cacat
6. Meninggal dunia akibat kecelakaan kerja
7. Santunan kematian di luar hubungan kerja

Dengan hanya membayar iuran sebesar 16.800 perbulan, manfaat ini dapat dirasakan oleh seluruh tenaga kerja yang sudah dinyatakan tergabung dalam sasaran program ini. Iuran ini ditetapkan untuk nantinya dialokasikan kedalam manfaat yang akan didapatkan melalui program UCOK (*Universal Coverage Ketenagakerjaan*).

Berdasarkan Teori Kinerja Mahsun pada indikator manfaat dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program UCOK (*Universal Coverage Ketenagakerjaan*) belum berjalan maksimal dikarenakan, manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat tenaga kerja baru melalui 2 program saja yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Sedangkan pada program BPJS Ketenagakerjaan memiliki 5 program. Tiga lainnya yaitu Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan belum dilakukan inovasi yang lebih mendalam sehingga menghasilkan manfaat untuk masyarakat tenaga kerja.

Dampak (*Impact*)

Indikator dampak (*impact*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah atau panjang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menemukan dampak yang dirasakan oleh pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Badung dan juga masyarakat tenaga kerja cukup baik. Walaupun pastinya ada beberapa kendala yang menjadi penghambat pelaksanaan program, namun tidak mempengaruhi dampak yang dihasilkan dalam pelaksanaan program ini.

Dampak dari program ini berkaitan dengan tujuan dari dilaksanakannya program UCOK (*Universal Coverage Ketenagakerjaan*), yaitu ingin meningkatkan kesejahteraan dari tenaga kerja dengan keselamatan kerja yang terjamin. Untuk menjamin itu, program ini bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan supaya tidak ada satupun tenaga kerja yang tertinggal untuk mendapatkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dampak yang diberikan dari keberlangsungan program UCOK (*Universal Coverage Ketenagakerjaan*) ini menyasar masyarakat tenaga kerja dan pemerintah sendiri. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung yang menanungi langsung dan bertanggung jawab penuh atas program ini. Dampak yang dirasakan memang belum terlihat dengan jelas, namun dari hasil yang sudah ada sejauh ini, belum ada kendala yang merugikan yang menyebabkan program ini memberikan dampak yang buruk baik bagi masyarakat tenaga kerja maupun bagi pemerintah. Dampak dari adanya program ini juga akan terus ditinjau kedepannya untuk hasil yang lebih baik

Berdasarkan Teori Kinerja Mahsun pada dampak dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan program UCOK (*Universal Coverage Ketenagakerjaan*) Di Kabupaten Badung sudah cukup baik. Dampak dari program ini harus terus ditinjau untuk hasil yang lebih baik mengingat perjalanan program ini masih panjang hingga tahun 2026. Namun untuk saat ini, dampak yang dapat dilihat

dari segi pemerintah dan masyarakat tenaga kerja sudah *balance*. Hal ini berarti bahwa program yang dijalankan sudah seimbang baik untuk sasaran program yakni tenaga kerja dan juga pelaksana program yakni Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung.

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja melalui program UCOK (*Universal Coverage Ketenagakerjaan*) di Kabupaten Badung sudah berjalan dengan baik namun belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan analisa pada 6 (enam) indikator penilaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Teori Kinerja Mahsun pada indikator masukan (*input*) dalam penelitian ini dapat disimpulkan belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan komponen yang mendukung untuk keberhasilan program terdapat kendala. Kendala yang dimaksud adalah masih kurangnya sumber daya manusia untuk mencapai keberhasilan program, sehingga harus melibatkan instansi lain untuk mendorong keberlangsungan program. Bekerjasama dengan instansi lain akan memberikan dampak yang kurang baik terhadap kinerja dinas itu sendiri. Salah satu contohnya seperti keterlambatan informasi yang masuk untuk mengcover Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sehingga akan mempengaruhi ketepatan capaian program.
2. Berdasarkan Teori Kinerja Mahsun pada indikator proses (*process*) dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program UCOK (*Universal Coverage Ketenagakerjaan*) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di Kabupaten Badung belum optimal. Karena, masih belum ada SOP yang pasti untuk keberlangsungan program ini. Selain itu, jadwal yang sudah ditetapkan pun masih belum efektif mengingat banyak keterlambatan yang terjadi dalam meng-cover Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk para pekerja yang sudah lolos verifikasi. Hal ini dikarenakan proses pelaksanaan yang belum pasti kapan waktu yang tepat untuk memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Selain itu, alur pelaksanaan pun masih rancu dan belum dibuatkan mekanisme yang jelas dan yang pasti agar memudahkan pelaksanaan program.
3. Berdasarkan Teori Kinerja Mahsun pada indikator keluaran dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keluaran dari program UCOK (*Universal Coverage Ketenagakerjaan*) belum memiliki bentuk yang pasti. Saat ini hanya dalam bentuk laporan yang dipresentasikan saat kegiatan evaluasi berlangsung. Keluaran yang diharapkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran program tidak berjalan beriringan. Dimana tujuan dan sasaran program ini sudah jelas namun keluaran yang dihasilkan belum memiliki kejelasan sampai ditahun 2023.
4. Berdasarkan Teori Kinerja Mahsun pada indikator hasil dalam penelitian ini dapat disimpulkan belum optimal. Mengingat permasalahan diawal belum meratanya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja formal dan informal, hasil yang diberikan selama 2 tahun program ini berjalan tidak tercapai. Hasil yang baru dicapai pun belum menginjak 50% dari target tenaga kerja yang menjadi sasaran program
5. Berdasarkan Teori Kinerja Mahsun pada indikator manfaat dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program UCOK (*Universal Coverage Ketenagakerjaan*) belum berjalan maksimal dikarenakan, manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat tenaga kerja baru melalui 2 program saja yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Sedangkan pada program BPJS Ketenagakerjaan memiliki 5 program. Tiga lainnya yaitu Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan belum dilakukan inovasi yang lebih mendalam sehingga menghasilkan manfaat untuk masyarakat tenaga kerja.
6. Berdasarkan Teori Kinerja Mahsun pada dampak dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa

dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan program UCOK (*Universal Coverage* Ketenagakerjaan) Di Kabupaten Badung sudah cukup baik. Dampak dari program ini harus terus ditinjau untuk hasil yang lebih baik mengingat perjalanan program ini masih panjang hingga tahun 2026. Namun untuk saat ini, dampak yang dapat dilihat dari segi pemerintah dan masyarakat tenaga kerja sudah *balance*. Hal ini berarti bahwa program yang dijalankan sudah seimbang baik untuk sasaran program yakni tenaga kerja dan juga pelaksana program yakni Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung berupa rekomendasi solusi terhadap permasalahan yang ada yakni:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menambah jumlah sumber daya manusia yang dalam hal ini adalah tim pengawas pelaksanaan program UCOK (*Universal Coverage* Ketenagakerjaan) di Kabupaten Badung.
2. Membentuk tim pengawas khusus yang ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan program UCOK (*Universal Coverage* Ketenagakerjaan) pada OPD di Kabupaten Badung.
3. Pembuatan SOP dan alur pelaksanaan yang jelas mengingat permasalahan di awal yaitu capaian target dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung masih belum optimal.
4. Pembuatan laporan pertanggungjawaban yang jelas. Bentuk laporan yang jelas yang dimaksud adalah untuk bahan evaluasi di tahun berikutnya supaya kendala dan pencapaian yang terjadi dalam pelaksanaan program UCOK (*Universal Coverage* Ketenagakerjaan) dapat dipertanggungjawabkan dengan pihak-pihak yang terlibat.
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang rutin sesuai dengan jadwal yang dibuat. Selain harapan untuk hasil pelaksanaan yang baik, monitoring dan evaluasi yang dilakukan juga bertujuan untuk melihat apakah pelaksanaan program sudah berjalan sesuai perencanaan di awal atau tidak.

Daftar Pustaka

- About Us: OJK Institute*. (2023, March 21). Retrieved from OJK Institute Website: <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/news/read/1106/kadin-dalam-peningkatan-kualitas-sumber-daya-manusia-indonesia>
- About Us: BPJS Ketenagakerjaan*. (2021). Retrieved from BPJS Ketenagakerjaan Web site: <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tentang-kami.html>
- Anik, S. U. (2015). KEBIJAKAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SEKTOR INFORMAL BERBASIS KEADILAN SOSIAL UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN. 558-562.
- Arsit La Udin, J. G. (2023). Strategi Dinas Tenaga Kerja Dalam Penanggulangan Pengangguran Terbuka Di Kota Baubau. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1-12.
- Dahyar Daraba, A. B. (2018). Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja di Kota Makassar. *Jurnal Administrare*, 1-12.
- Dr. Hamzah B. Uno, M. d. (2012). *Teori Kinerja dan Pengukurannya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dr. Harbani Pasolong, M. (2016). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Hardjo, B. (2015). *Penilaian Kinerja Karyawan*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Ferdinand Waititu, D. P. (2017). Effect of Employee Welfare Programmes On Employee Performance: A Case Study Of Kenya Railways Corporation. *International Academic Journal of Human Resource and Business Administration*, 612-621.
- Gusti Ayu Putu Dina Aryani, P. N. (2021). Kinerja Dinas Pariwisata Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Jasa Akomodasi Pariwisata Villa Di Kabupaten Badung. *Journal Of Contemporary Public Administration*.

- Indri Hanifah, G. P. (2018). Kinerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dalam Melaksanakan Program Pengurangan Angka Pengangguran. *Jurnal Governansi*, 1-12.
- Kesejahteraan Tenaga Kerja. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 79-80.
- Lubis, N. A. (2023). Analisis BPJS Ketenagakerjaan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja Khususnya Petani Di Bangun Purba. *Jurnal Mirai Management*, 326-328.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Manullang. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Prabawati, N. P. A., & Supriyanti, N. W. (2021). Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gianyar dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, 1(3), 141-146.
- Paramita, P. M. A. P., & Wirantari, I. D. A. P. (2023). Kinerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Badung (Studi Kasus: KPU Kabupaten Badung). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 4747-4753.
- Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Sembiring, M. (2012). *Budaya dan Kinerja Organisasi*. Bandung: Fokus Media.
- Soleh, C. d. (2011). *Menilai Kinerja Pemerintah Daerah*. Bandung: Fokus Media.
- Sudarmanto. (2009). *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM: Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi dalam Organisasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suripto, C. S. (2011). *Menilai Kinerja Pemerintah Daerah*. Bandung: Fokusmedia.
- Sutrisno, H. (2020). Pengaruh BPJS Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- Yu Wei, H. N. (2020). The Impact Of Welfare On Innovation Performance: Evidence From China's Manufacturing Corporations. *International Journal of Production Economics*.